

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

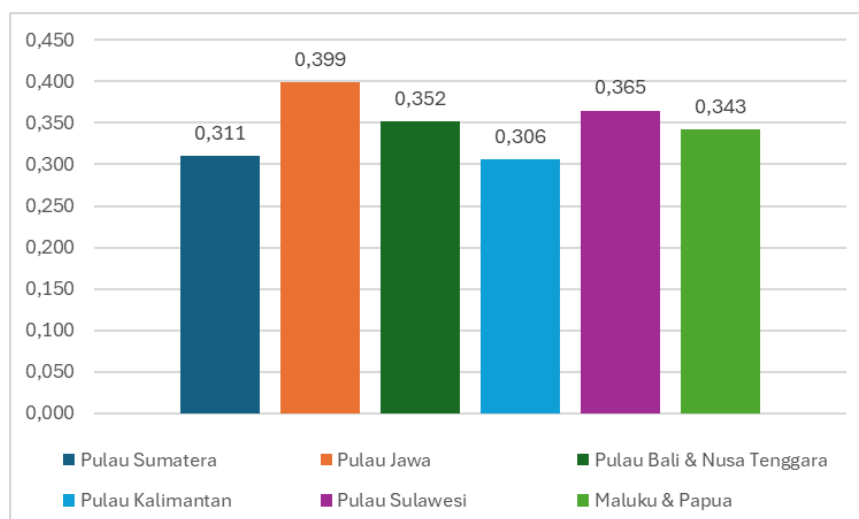
Pembangunan ekonomi pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup, tingkat kecerdasan, serta kesejahteraan masyarakat secara lebih adil dan merata, sekaligus membangun fondasi yang kuat bagi keberlanjutan pembangunan di masa mendatang. Namun, dalam praktiknya, pembangunan ekonomi sering kali tidak berlangsung secara merata. Ketimpangan pendapatan antar daerah menjadi salah satu permasalahan utama yang kerap muncul, di mana sebagian wilayah mampu tumbuh dengan pesat sementara wilayah lainnya mengalami pertumbuhan yang relatif lambat. Kondisi tersebut menyebabkan perbedaan tingkat kemajuan dan pembangunan antardaerah, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk miskin di wilayah tertentu (Violin & Lutfi, 2022).

Permasalahan yang sering dihadapi oleh negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah ketimpangan pendapatan yang menjadi salah satu isu krusial dalam proses pembangunan dan perlu mendapatkan perhatian serta pengendalian. Ketimpangan pendapatan tersebut tercermin dari perbedaan kondisi antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Ketimpangan pendapatan diartikan sebagai adanya perbedaan dalam peningkatan kesejahteraan, gaya hidup, serta tingkat pendapatan yang diperoleh oleh suatu wilayah dalam kegiatan ekonomi, sehingga menimbulkan

distribusi manfaat dan pembayaran publik yang tidak merata di tengah masyarakat (Julihanza & Khoirudin, 2023).

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kondisi wilayah yang beragam, sehingga perkembangan ekonomi antar daerah tidak berlangsung secara merata. Perbedaan karakteristik wilayah menyebabkan kemampuan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi juga berbeda, di mana sebagian daerah dapat berkembang lebih cepat, sementara daerah lainnya mengalami pertumbuhan yang lebih lambat. Kondisi tersebut menimbulkan ketimpangan pembangunan yang selanjutnya berdampak pada ketimpangan pendapatan, yang ditandai oleh distribusi pendapatan yang belum merata serta perbedaan yang cukup besar antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan berpendapatan rendah, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia (Saraswati & Darmawan, 2020).

Berikut merupakan perbandingan nilai rata-rata gini rasio pulau di Indonesia Tahun 2022-2024.



Sumber: BPS, data diolah.

Gambar 1.1 Perbandingan Nilai Rata-Rata Gini Rasio Pulau di Indonesia Tahun 2022-2024

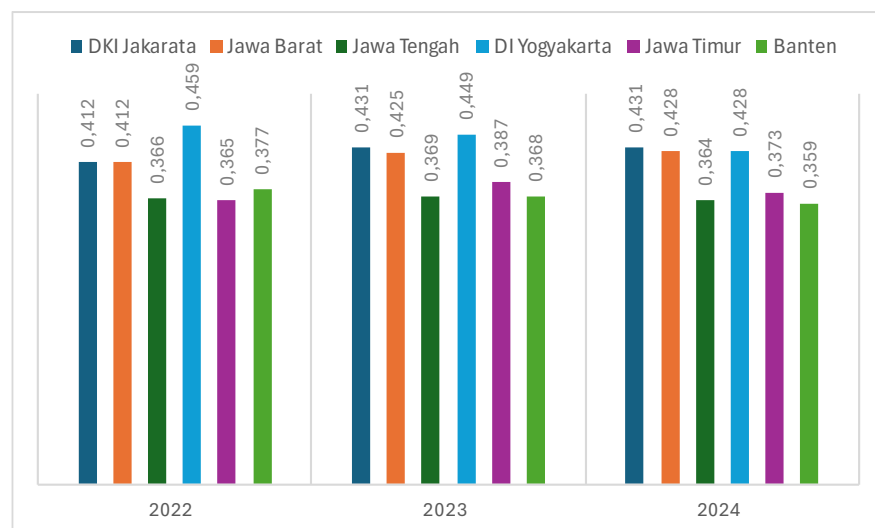
Berdasarkan Gambar 1.1 fenomena ketimpangan pendapatan di Indonesia tercermin dari nilai rata-rata Rasio Gini yang menunjukkan perbedaan distribusi pendapatan antarwilayah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2022–2024, Pulau Jawa secara konsisten memiliki nilai Rasio Gini tertinggi dibandingkan pulau-pulau utama lainnya di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Pulau Jawa merupakan pusat pertumbuhan ekonomi nasional, hasil pembangunan belum terdistribusi secara merata di wilayah tersebut. Ketimpangan yang relatif tinggi di Pulau Jawa mengindikasikan adanya konsentrasi aktivitas ekonomi dan pendapatan pada kelompok masyarakat tertentu, terutama di wilayah perkotaan.

Berdasarkan uraian tersebut, Pulau Jawa dipilih karena wilayah ini merupakan pusat kegiatan ekonomi nasional dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang relatif lebih tinggi dibandingkan pulau-pulau lain di Indonesia. Meskipun memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, pemerataan hasil pembangunan di Pulau Jawa masih menghadapi berbagai kendala, terutama akibat perbedaan struktur ekonomi, tingkat urbanisasi, dan akses terhadap sumber daya antardaerah (Rachmawatie, 2021). Kondisi ini menjadikan Pulau Jawa sebagai wilayah yang relevan untuk mengkaji dinamika ketimpangan pendapatan secara lebih mendalam.

Berdasarkan Gambar 1.2 di bawah, penelitian ini memfokuskan analisis pada empat provinsi di Pulau Jawa, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Pemilihan keempat provinsi tersebut didasarkan pada fakta bahwa selama periode 2022–2024, provinsi-provinsi tersebut secara konsisten

memiliki nilai Rasio Gini yang relatif tinggi dan berulang kali masuk dalam kelompok provinsi dengan tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi secara nasional. Selain itu, keempat provinsi ini merepresentasikan karakteristik ekonomi yang berbeda, mulai dari pusat pemerintahan dan jasa (DKI Jakarta), kawasan industri dan urbanisasi tinggi (Jawa Barat), wilayah dengan struktur ekonomi berbasis pendidikan dan pariwisata (DI Yogyakarta), hingga daerah dengan basis industri dan pertanian yang kuat (Jawa Timur). Perbedaan karakteristik tersebut memungkinkan analisis ketimpangan pendapatan dilakukan secara lebih komprehensif dalam satu kawasan ekonomi yang sama, yaitu Pulau Jawa (Putri Fiyantika et al., 2025).

Berikut perkembangan gini rasio enam provinsi di Pulau Jawa tahun 2022-2024.



Sumber: BPS, data diolah.

Gambar 1.2 Perkembangan Gini Rasio Enam Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2022-2024

Berdasarkan fenomena tersebut, ketimpangan pendapatan di empat provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur, layak untuk diteliti secara lebih mendalam. Keempat provinsi ini merupakan wilayah dengan peran strategis dalam perekonomian nasional dan daerah dengan capaian pertumbuhan ekonomi serta pembangunan manusia tinggi, namun pada saat yang sama masih menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang relatif tinggi dan berkelanjutan.

Berkaitan dengan tingginya ketimpangan pendapatan di empat provinsi di Pulau Jawa, salah satu faktor yang diduga berperan dalam memengaruhi kondisi tersebut adalah kualitas pembangunan manusia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di berbagai daerah menunjukkan bahwa IPM mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang menandakan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat. Hal tersebut mencerminkan kemajuan pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak yang mendorong peningkatan produktivitas penduduk (Makipantung et al., 2023).

Produktivitas yang lebih tinggi memungkinkan masyarakat memperoleh pendapatan yang lebih baik sehingga secara teoritis dapat memperkecil kesenjangan pendapatan. Sebaliknya, wilayah dengan capaian IPM yang relatif rendah masih menghadapi keterbatasan kualitas sumber daya manusia yang berdampak pada rendahnya tingkat pendapatan masyarakat. Meskipun IPM di empat provinsi di Pulau Jawa mengalami peningkatan, ketimpangan pendapatan masih tergolong tinggi, yang menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia belum sepenuhnya dinikmati secara merata. Perbedaan capaian IPM antar wilayah

dan kelompok masyarakat inilah yang menjadi salah satu faktor penting dalam menjelaskan terjadinya ketimpangan pendapatan (Pradnyadewi & Purbadharmaja, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Meidiyan et al., (2025) menyimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Berbeda dengan temuan tersebut, Firdaus dan Hasmarini (2023) menunjukkan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, terdapat indikasi bahwa peningkatan IPM memengaruhi ketimpangan pendapatan, meskipun arah dan tingkat signifikansi pengaruhnya berbeda antar wilayah dan periode penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam memengaruhi distribusi pendapatan Masyarakat.

Meskipun IPM mencerminkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan tersebut belum tentu diikuti oleh terserapnya penduduk secara optimal dalam pasar kerja, yang tercermin dari masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di berbagai wilayah, termasuk empat provinsi di Pulau Jawa. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas manusia belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja, sehingga sebagian penduduk tidak memperoleh pendapatan atau hanya menerima upah yang rendah. Akibatnya, kesenjangan antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah semakin melebar. Oleh karena itu, tingkat pengangguran terbuka dipilih sebagai variabel penelitian karena memiliki hubungan yang searah dengan ketimpangan pendapatan, di mana

peningkatan pengangguran cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan, sedangkan penurunannya berpotensi menurunkan ketimpangan pendapatan (Sholikah & Imaningsih, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Pasoman & Sumarjiyanto (2024) menunjukkan bahwa TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sedangkan penelitian Rahayu dan Febriaty (2024) menemukan bahwa TPT berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa TPT memengaruhi ketimpangan pendapatan, meskipun arah pengaruhnya bervariasi antar wilayah dan periode penelitian. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh tingkat pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan sangat bergantung pada kondisi pasar tenaga kerja dan struktur ekonomi daerah.

Selain tingkat pengangguran, distribusi pendapatan juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan pengupahan, khususnya upah minimum. Fenomena di empat provinsi Pulau Jawa menunjukkan bahwa penerapan upah minimum berperan penting dalam menentukan distribusi pendapatan masyarakat. Di beberapa provinsi, kenaikan upah minimum mampu meningkatkan pendapatan pekerja formal dan memperkecil kesenjangan pendapatan. Sementara di provinsi lain, upah minimum yang tidak merata atau tidak menjangkau seluruh pekerja, terutama sektor informal, masih berpotensi mempertahankan ketimpangan pendapatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upah minimum menjadi salah satu instrumen kebijakan yang dapat diteliti dalam menjaga kesejahteraan pekerja berpenghasilan rendah dan

memengaruhi pola ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa (Hanum & Sarlia, 2019).

Upah minimum berfungsi untuk melindungi pekerja dari upah yang terlalu rendah dan mendorong pemerataan pendapatan antarindividu maupun antarkelompok masyarakat. Namun, penetapan upah minimum harus seimbang agar tidak menimbulkan tekanan pada pasar tenaga kerja, upah yang terlalu tinggi dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, sedangkan upah yang terlalu rendah gagal meningkatkan kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, kebijakan upah minimum memiliki hubungan langsung dengan ketimpangan pendapatan, karena efektivitasnya dalam meningkatkan pendapatan pekerja bawah berpotensi memperkecil kesenjangan pendapatan di masyarakat (Rohmah & Sastiono, 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Firdaus dan Hasmarini (2023) menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Aminda (2024) menemukan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya indikasi bahwa upah minimum berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, meskipun arah dan tingkat signifikansi pengaruhnya berbeda antar studi dan wilayah. Hal ini mengisyaratkan bahwa kebijakan pengupahan dapat memperbaiki distribusi pendapatan, tetapi efektivitasnya dipengaruhi oleh kondisi pasar tenaga kerja dan kemampuan dunia usaha dalam menyerap tenaga kerja.

Di era digital, efektivitas kebijakan upah dan kesempatan kerja semakin dipengaruhi oleh perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pemanfaatan TIK dapat membuka peluang kerja baru, meningkatkan efisiensi produksi, serta memperluas akses pasar, yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan pendapatan Masyarakat (Lucya & Anis, 2019).

Namun demikian, dampak TIK terhadap ketimpangan pendapatan tidak selalu bersifat menurunkan. Ketimpangan justru dapat meningkat apabila akses dan pemanfaatan TIK hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu yang memiliki kemampuan ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur pendukung yang memadai. Kesenjangan digital ini menyebabkan sebagian masyarakat tertinggal dalam memanfaatkan peluang ekonomi berbasis teknologi, sehingga manfaat TIK tidak terdistribusi secara merata. Oleh karena itu, perkembangan TIK dapat menjadi faktor yang bersifat dua arah, yaitu berpotensi menekan sekaligus memperlebar ketimpangan pendapatan, tergantung pada tingkat pemerataan akses dan kemampuan masyarakat dalam mengadopsinya (Fauziah & Sari, 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al., (2022) serta Sari & Fauziah (2025) menunjukkan bahwa Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Berbeda dengan temuan tersebut, penelitian Rahmadi et al., (2024) menyimpulkan bahwa TIK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan Temuan penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa TIK berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, meskipun arah dan tingkat signifikansi pengaruhnya bervariasi antar studi dan wilayah. Perbedaan hasil ini

menandakan bahwa pemerataan akses dan pemanfaatan teknologi menjadi faktor penting dalam menentukan dampak TIK terhadap ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, terdapat *gap* (kesenjangan) yang mendorong perlunya penelitian yang lebih mendalam mengenai ketimpangan pendapatan di empat provinsi Pulau Jawa. Hingga saat ini, variabel IPM, tingkat pengangguran, upah minimum, dan TIK belum banyak dikaji secara bersamaan dalam satu kerangka penelitian yang komprehensif, khususnya pada empat provinsi di Pulau Jawa. Untuk menganalisis hubungan antarvariabel tersebut, penelitian ini menggunakan metode *Generalized Method of Moments* (GMM). Metode GMM dipilih karena mampu mengolah data panel dan memberikan gambaran pengaruh variabel dalam jangka pendek maupun jangka panjang selama periode 2010–2024. Oleh karena itu, skripsi ini dilakukan dengan judul **“Pengaruh Faktor Ekonomi dan Teknologi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Empat Provinsi Pulau Jawa Tahun 2010-2024 Menggunakan Pendekatan *Generalized Method of Moments*”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh jangka pendek indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, upah minimum, dan teknologi informasi dan komunikasi secara parsial terhadap ketimpangan pendapatan empat provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2024?

2. Bagaimana pengaruh jangka panjang indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, upah minimum, dan teknologi informasi dan komunikasi secara parsial terhadap ketimpangan pendapatan empat provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2024?
3. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, upah minimum, dan teknologi informasi dan komunikasi secara bersama-sama terhadap ketimpangan pendapatan empat provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh jangka pendek indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, upah minimum, dan teknologi informasi dan komunikasi secara parsial terhadap ketimpangan pendapatan empat provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh jangka panjang indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, upah minimum, dan teknologi informasi dan komunikasi secara parsial terhadap ketimpangan pendapatan empat provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, upah minimum, dan teknologi informasi dan komunikasi secara bersama-sama terhadap ketimpangan pendapatan empat provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2024.

1.4 Kegunaan Penelitian

Setelah penelitian ini dilaksanakan, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu ekonomi pembangunan, khususnya kajian ketimpangan pendapatan antar wilayah. Dengan menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran, upah minimum, serta teknologi informasi dan komunikasi terhadap ketimpangan pendapatan di empat provinsi Pulau Jawa pada tahun 2010–2024, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bukti empiris yang relevan. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan perbedaan temuan penelitian terdahulu yang masih menunjukkan ketidakkonsistenan, terutama terkait peran variabel teknologi, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dengan cakupan yang lebih luas.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai ketimpangan pendapatan dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah dalam upaya menurunkan ketimpangan pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pulau Jawa dengan cakupan wilayah pada empat provinsi, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi D.I. Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui pengumpulan data yang bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) serta berbagai sumber lain yang relevan dan mendukung kebutuhan penelitian.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini diawali dengan pengajuan judul kepada Program Studi Ekonomi Pembangunan serta penyerahan Surat Keputusan (SK) bimbingan. Selanjutnya, penelitian dilaksanakan melalui tahapan konsultasi dan proses bimbingan secara berkelanjutan dengan dosen pembimbing. Adapun jadwal pelaksanaan penelitian ini disajikan sebagaimana tercantum pada:

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian

[illegible]